



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN; PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI;
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA;
BADAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/SAR, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang : 2015 – 2016
Masa Sidang : III
Rapat : Ke -
Jenis Rapat : **Rapat Kerja**
Hari/Tanggal : Rabu, 16 Maret 2016
Sifat : Terbuka
Pukul : 09.30 WIB s.d 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI (Ruang KK V)
Gedung Nusantara.
Acara : a. Penyampaian DIM RUU tentang. Jasa Konstruksi dari Pemerintah;
b. Pembahasan DIM RUU tentang. Jasa Konstruksi;
c. Pembentukan Panitia Kerja (PANJA) Pembahasan RUU tentang. Jasa Konstruksi.
Ketua Rapat : Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota : dari 51 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Pemerintah : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Tenaga Kerja atau yang mewakili, Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili, Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pukul 09.35 wib setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja hari ini adalah penyampaian DIM RUU tentang. Jasa Konstruksi dari Pemerintah; pembahasan DIM RUU tentang. Jasa Konstruksi; dan pembentukan Panitia Kerja (PANJA) Pembahasan RUU tentang. Jasa Konstruksi.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan secara resmi DIM RUU tentang Jasa Konstruksi dari Pemerintah kepada DPR RI
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan penjelasan secara garis besar mengenai pokok-pokok permasalahan dalam DIM RUU tentang Jasa Konstruksi yang telah disusun oleh Pemerintah tersebut.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :.../Hal. 2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Rapat Kerja menyetujui DIM yang diusulkan **TETAP** oleh Pemerintah berjumlah 254 DIM dengan catatan apabila ada hal-hal yang bersifat substansial dapat dibahas/disempurnakan kembali oleh Panja, yaitu DIM No. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 26, 27, 28, 29; 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; 50, 51, 52, 53, 232, 233, 236, 237, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 254, 255, 260, 261, 262, 264, 265, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 283, 284, 287, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 326, 327, 329, 335, 336, 341, 342, 343, 344, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 368, 369, 370, 372, 376, 377, 378, 379, 382, 383, 384, 388, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 442, 448, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 458, 460, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 477, 478, 482, 484, 522, 526, 529, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 540, 545, 546, 550, 553, 557, 571, 573, 578, 579, 580, 581, 595, 599, 603, 616, 617, 619, 620, 624, 626, 627, 628, 629, 630, 634, 639, 644, 648, 649, 732, 733, 734, 735, 739, 740, 741, 746, 749, 750, 751, 755, 757, 758, 759, 763, 765, 782, 784, 789, 798, 799, 804, 806, 807, 808, 812, 813, 823, 824, 827, 831, 833, 834, 835, 838, 839, 841, 845, 846, 847, 851, 857, 862, 863, 869, 870, 871, 874, 877, 884, 893, 895, 896, 897, 898, 901, 902, 903, 905.
2. Untuk DIM-DIM lainnya yang terdapat usulan perubahan berupa: penyempurnaan redaksional; perubahan substansi; penambahan substansi baru; penghapusan; dan yang direposisi (atau dipindahkan ke BAB lain) **langsung diserahkan kepada Panja untuk mem bahas nya** secara lebih mendalam dan komprehensif.
3. Rapat Kerja sepakat untuk membentuk PANJA pembahasan RUU tentang Jasa Konstruksi dan keanggotaan PANJA dari Komisi V DPR RI sesuai mekanisme pembahasan berjumlah paling banyak separuh Anggota Komisi, yang mencerminkan Fraksi-Fraksi dengan komposisi sebagai berikut

NO	FRAKSI	ANGGOTA PANJA (termasuk Pimpinan)
1	PDI-P	5
2	GOLKAR	5
3	GERINDRA	4
4	DEMOKRAT	3
5	PAN	3
6	PKB	2
7	PKS	2
8	PPP	2
9	NASDEM	2
10	HANURA	1
	TOTAL	29

4. Tim Panja dari pihak pemerintah, Menteri PUPR akan menugaskan Pejabat Eselon I dan Eselon II serta pejabat terkait lainnya dari Kementerian/Lembaga yang akan mewakili pemerintah dalam proses pembahasan Panja RUU tentang Jasa Konstruksi.

5. Jadwal Rapat-rapat pembahasan Panja RUU tentang Jasa Kontruksi akan dilanjutkan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016 pada minggu pertama bulan April 2016.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.00 WIB.

Jakarta, 16 Maret 2016

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

TTD

M. BASOEKI HADIMOELJONO

KETUA RAPAT,

TTD

FARY DJEMY FRANCIS